

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	11
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
BAB II METODE PEMBENTUKAN <i>OMNIBUS LAW</i> DALAM SISTEM HUKUM PERUNDANG - UNDANGAN	13
2.1 <i>Omnibus Law</i> sebagai Metode Pembentukan Hukum.....	13
3.1.1 Konsep <i>Omnibus Law</i> sebagai Metode Pembentukan Hukum.....	13
3.1.2 Kelebihan serta Kekurangan <i>Omnibus Law</i> sebagai Metode Pembentukan Hukum	18
2.2 Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik dan Partisipasi dalam Proses Pembentukan <i>Omnibus Law</i>	27

2.2.1	Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang – Undang dengan Pendekatan <i>Omnibus Law</i>	27
2.2.2	Analisis Hukum (<i>Ratio Legis</i>) Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang dengan Pendekatan <i>Omnibus Law</i>	40
BAB III PEMBENTUKAN RUU CIPTA KERJA DITINJAU DARI PRINSIP KETERBUKAAN DAN PRINSIP PARTISIPASI PUBLIK		46
3.1	Tinjauan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Proses Pembentukan RUU Cipta Kerja	46
3.1.1	Tanggung Jawab Keterbukaan Informasi Draf RUU Cipta Kerja.	46
3.1.2	Analisis Hukum atas Tanggung Jawab Keterbukaan Informasi Draf RUU Cipta Kerja	50
3.2	Tinjauan Partisipasi Publik terhadap RUU Cipta Kerja.....	54
3.2.1	Pemenuhan Partisipasi Publik terhadap RUU Cipta Kerja.....	54
3.2.2	Analisis Hukum atas Pelaksanaan Partisipasi dalam Pembentukan RUU Cipta Kerja	59
BAB IV PENUTUP		67
4.1	Kesimpulan.....	67
4.2	Saran.....	70
DAFTAR BACAAN.....		xv
LAMPIRAN.....		xxii

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –
Undangan;

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik;

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi
Nasional; dan

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

DAFTAR TABEL

TABEL 1	KETERBUKAAN DAN PARTISIPASI DALAM TAHAPAN PERENCANAAN.....	33
TABEL 2	KETERBUKAAN DAN PARTISIPASI DALAM TAHAPAN PENYUSUNAN.....	35
TABEL 3	KETERBUKAAN DAN PARTISIPASI DALAM TAHAPAN PEMBAHASAN – PEMBICARAAN TINGKAT I.....	37